

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelusuran dan inventarisasi kepustakaan yang telah dilakukan di berbagai kepustakaan pada program doktor (S-3), maka penelitian mengenai tindakan diversi penanganan pelaku anak yang berhadapan dengan hukum pernah dilakukan, namun peneliti belum menemukan Disertasi yang meneliti tindakan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Made Ayu Citra Maya Sari (2012) melakukan penelitian dengan judul *Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Hasil penelitian menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum telah dituangkan dalam undang-undang seperti UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 3 Tahun 1979 tentang Pengadilan Anak, UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, semua aturan di atas mengacu pada konstitusi atau Pasal 34 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Ide diversi merupakan konsep dalam melindungi anak secara hukum dengan menghindari peradilan forman, pembalasan dan nilai buruk dari anak demi tumbuh kembang psikologi anak sebagai penerus bangsa.

Rendy H. Pratama (2014) melakukan penelitian dengan judul *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Hasil penelitian menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan terhadap seseorang, terutama anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan pada prinsip kemanusiaan dan keadilan.

Sehingga setiap orang harus mendapatkan haknya atas perlindungan terhadap rasa aman serta terbebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia yang bertentangan dengan apa yang dicita-citakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu terciptanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk mencapai layanan perlindungan anak korban kekerasan dan anak yang berhadapan dengan hukum secara terpadu dan komperhensif diperlukan bentuk layanan secara terpadu dari berbagai lembaga terkait meliputi pelayanan medis, mediocolegal, psikososial, bantuan hukum, pendampingan, kemandirian ekonomi (pelatihan). Layanan tersebut dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan keamanan dan perlindungan secara hukum.

Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah (2015) melakukan penelitian dengan judul Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh). Hasil penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum terdapat dalam berbagai bentuk, yaitu: 1) dalam UU No. 11 tahun 2012 bentuk-bentuk perlindungan tersebut terdapat berbagai unsur yaitu unsur aturan yang terkait dengan prosedur penyelesaian perkara secara litigasi, unsur penyelesaian perkara secara non litigasi, unsur aparat penegak hukum, dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara; 2) Perlindungan hukum yang diberikan oleh qanun Aceh adalah penyelesaian berbasis musyawarah dengan mengacu kepada adat yang berlaku dalam suatu masyarakat dengan mengedepankan musyawarah dan perlindungan terhadap

pihak-pihak yang berperkara. Bentuk perlindungan yang terdapat anak yang berhadapan dengan hukum dalam qanun adat Aceh belum terinci sebagaimana yang terdapat dalam UU No. 11 tahun 2012.

Relevansi UU No. 11 tahun 2012 terhadap qanun Aceh adalah qanun adat perlu mengadaptasi berbagai ketentuan terkait perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang terdapat dalam UU No. 11 tahun 2012. Sehingga, diharapkan setiap anak yang berhadapan dengan hukum mendapat perlindungan yang sama, baik ketika diselesaikan secara adat maupun oleh aparat penegak hukum.

I Made Sepud (2013) melakukan penelitian dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Hasil penelitian menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi adalah dengan mengaplikasikan diversi dalam SPPA di Indonesia, yang diformulasikan dalam sistem hukum materiel anak, dalam sistem hukum formal anak dan dalam sistem hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Aplikasi diversi untuk memberi jaminan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam SPPA Indonesia adalah bermanfaat nyata seperti: menghindari stigma pada anak, perdamaian pelaku dan korban mengurangi kasus masuk ke pengadilan sehingga akan mengurangi beban negara dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana. Diversi yang tepat diterapkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam SPPA Indonesia di masa datang adalah: perdamaian antara anak yang berhadapan dengan hukum dengan korban serta pemberian ganti rugi kepada korban dan anak yang berhadapan

dengan hukum dikembalikan untuk dididik oleh orang tuanya. Model diversi yang lain, yaitu: anak yang berhadapan dengan hukum mengikuti pendidikan atau pelatihan ke lembaga pendidikan atau lembaga sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah, negara, maupun oleh lembaga sosial kemasyarakatan dan para pemerhati perlindungan anak.

B. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan Hukum Hak Anak

a. Pengertian Anak

Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, hukum Islam dan batasan menurut kamus Bahasa. secara international definisi anak tertuang dalam konvensi perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai hak anak tahun 1989, aturan standar minimal perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai pelaksanaan peradilan anak tahun 1985 dan Deklarasi hak asasi manusia tahun 1948.

Secara nasional pengertian mengenai batasan umur anak dan pengertian anak sendiri dalam hukum pidana berbeda-beda namun dalam hukum Indonesia terdapat Undang-Undang terbaru yang memberikan pengertian tentang anak serta mengatur mengenai pidana anak serta batasan umur anak yang dapat di hukum pidana karena dalam hukum bahwa peraturan yang secara khusus mengenyampingkan peraturan yang umum yang dikenal dengan asas *lex specialis derogat lex generalis* selain itu ada asas yang menyebutkan bahwa pada peraturan sederajar peraturan yang baru melumpuhkan peraturan yang lama yang dikenal dengan asas *lex posterior derogat legi priori*.

Pengertian anak di Indonesia dibedakan menurut batasan umurnya dan diatur menurut bidang hukumnya masing-masing. Secara yuridis kedudukan seorang anak menimbulkan akibat hukum. Dalam lapangan hukum keperdataan, akibat hukum terhadap kedudukan seorang anak menyangkut kepada persoalan-persoalan hak dan kewajiban, seperti masalah kekuasaan orang tua, pengakuan sahnyanya anak, penyangkalan sahnyanya anak, perwalian pendewasaan, serta masalah pengangkatan anak dan lain-lain. Sedangkan dalam lapangan hukum pidana menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana (Sambas, 2013:4).

Pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa (Poerwadarminta, 1984: 25). Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan (Djamil, 2013: 8).

Menurut Kosnan (2005: 113) anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya. Oleh karna itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak bisa menyuarakan pendapatnya, serta anak lebih sering dijadikan korban tindakan kekerasan (Gosita, 1992: 28).

Menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pengertian anak bermacam-macam antara lain:

- 1) Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak adalah seseorang yang umurnya belum mencapai 21 tahun dan belum melakukan perkawinan. Maka jika anak telah menikah sebelum umur 21 tahun dan bercerai atau pasangannya meninggal maka anak tersebut tetap dianggap sebagai orang dewasa bukan seorang anak-anak lagi (Subekti dan Tjitrosudibio, 2002: 90).
- 2) Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak, anak merupakan seseorang yang umurnya belum mmencapai 16 tahun.
- 3) Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- 4) Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

Berdasarkan beberapa pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan di atas, maka disimpulkan bahwa anak yang berkonflik, dengan hukum Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau yang selanjutnya disingkat UU SPPA menyatakan anak yang berkonflik adalah anak yang sudah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang masih diduga telah melakukan tindak pidana.

Selain itu, anak pengertiannya dalam perundang-undangan berbeda dengan pengertian anak dengan hukum islam dan adat. Pengertian anak menurut hukum Islam dan adat sama-sama menentukan seseorang yang masih anak-anak dengan cara yang berbeda dengan usia dewasa dikarenakan nak memiliki usia berbeda-

beda dalam mencapai ukuran kedewasaannya. Dalam hukum islam dalam menentukan kedewasaan dari seorang anak dinyatakan jika seseorang dinyatakan sebagai anak adalah jika anak tersebut belum memiliki tanda-tanda yang dimiliki orang dewasa yang ditentukan dalam hukum islam. Seorang tokoh adat yaitu Ter Har menyatakan bahwa dalam menentukan apakah seseorang dikategorikan sebagai anak-anak atau orang dewasa yaitu dengan melihat unsur yang dipenuhi seseorang seperti anak tersebut sudah kawin, sudah meninggalkan rumah dan mendirikan keluarga sendiri dikategorikan sebagai dewasa.

Pengertian anak secara bahasa adalah seseorang yang masih berada di bawah umur/belum cukup umur untuk melakukan hal-hal umum. Dalam beberapa hal kepolosan dan keluguan anak dapat dimanfaatkan oleh orang dewasa sebagai celah untuk melakukan suatu tindakan yang merugikan anak. Anak berbeda dengan orang dewasa, anak masih belum cukup matang dalam beberapa hal yaitu belum matang secara fisik, psikis maupun mentalnya. Anak masih perlu ditemani, dibimbing, diarahkan, dilindungi oleh orang dewasa sehingga anak dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan khusus serta memerlukan perlindungan yang khusus pula, terutama pada tindakan-tindakan yang dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani pada diri anak (Prakoso, 2013:24).

b. Hak dan Kewajiban Anak

Anak sebagai pribadi yang unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun anak dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitarnya berpengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua,

guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan pemerintah sangat dibutuhkan oleh anak dalam perkembangannya.

Anak adalah generasi muda penerus bangsa, dengan adanya fakta bahwa banyak terjadi pelanggaran yang korbannya anak maka pemerintah membuat berbagai macam peraturan untuk melindungi hak anak agar anak dapat berkembang dengan baik. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi ke arah hal yang positif. Ini berarti dilindunginya anak untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama para pelindungnya (Gosita, 1996:14).

Berbagai perundang-undangan sudah mengatur tentang hak dan kewajiban anak antara lain:

1) Hak-Hak Anak

- a) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Pasal 4

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup tumbuh, kembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pasal 8

“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial”.

Pasal 13 ayat (1)

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- (1) Diskriminasi
- (2) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- (3) Penelantaran
- (4) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
- (5) Ketidakadilan, dan
- (6) Perlakuan salah lainnya.”

- b) Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan.

“Setiap bayi dan anak berhak terlindungi dan terhindar dari segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan yang dapat mengganggu kesehatannya”.

- c) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 2

Anak berhak atas

- (1) Kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- (2) Pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
- (3) Pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

Pasal 5 ayat (1)

“Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.”

- d) Konvensi Hak-hak Anak

Indonesia telah meratifikasi *Convention on The right of The Child*

(Konvensi Hak-Hak Anak) konvensi Hak-hak Anak mengelompokkan

4 (empat) kategori hak-hak anak yaitu:

- (1) Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival Right*), yaitu hak-hak anak dalam konvensi Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*The right to highest standart of health and medical care-attainable*).
 - (2) Hak terhadap perlindungan (*protection rights*) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
 - (3) Hak untuk tumbuh kembang (*develovment right*) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak demi perkembangan fisik, mental, spritual, moral dan sosial anak.
 - (4) Hak untuk berpartisipasi (*partisipation rights*) yaitu hak dalam menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.
- e) Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat dan Negara”
- f) Pasal 62 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- “Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jasmani sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spritualnya.”

2) Kewajiban Anak

- a) Pasal 19 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- “Setiap anak wajib untuk:
- (1) Menghormati orang tua, wali dan guru.
 - (2) Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman
 - (3) Mencintai tanah air, bangsa dan negara
 - (4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya,dan
 - (5) Melaksanakan etika dan akhlam yang mulia.”
- b) Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

“Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik”.

- c) Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

“Jika anak telah dewasa wajib memelihara menurut kemampuannya orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas bila mereka itu memerlukan bantuannya”.

- d) Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

“Anak yang belum mencapai umur (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.”

c. Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Anak yang sedang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang terlibat dalam permasalahan hukum sebagai saksi, pelaku, atau korban tindak pidana. Sementara anak tidak bisa mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, karena anak dalam masa tumbuh kembang dan belum dewasa mengingat usianya sehingga dalam hal ini anak wajib mendapatkan perlindungan hal tersebut sesuai dengan peraturan undang-undang yang ada. Dalam hal tersebut dapat dikatakan anak jika seseorang telah berumur mencapai 8 tahun namun belum mencapai umur 18 tahun dan belum menikah. Ada beberapa faktor timbulnya anak yang sedang berhadapan dengan hukum yang digolongkan menjadi dua faktor yaitu internal dan eksternal. Faktor internal sendiri meliputi ekonomi keluarga yang terbatas, ketidakharmonisan keluarga, anak tidak mendapatkan perhatian dari orang tua biasanya karena orangtua sibuk bekerja dan lemah atau kurangnya pendidikan moral pada orangtua ataupun anak. Sedangkan faktor eksternal meliputi perkembangan teknologi yang semakin pesat namun mental anak belum disiapkan, pertemanan atau lingkungan bermain anak yang

tidak baik, kurangnya lembaga atau suatu forum konseling dimana anak dapat mencurahkan kisah atau isi hatinya, kurangnya fasilitas yang mendukung kreativitas anak sehingga menjadikan anak mencari kegiatan lain yang kebutuhan kegiatan tersebut menyimpang (Nurhaeni, 2010:63).

Pengertian anak yang berhadapan dengan hukum sebenarnya sudah dijelaskan dalam UU SPPA Pasal 1 ayat (2) dan (3) yaitu bahwa anak yang menjadi sanksi, pelaku ataupun korban tindak pidana. Selanjutnya anak yang berkonflik dengan hukum merupakan anak yang berumur 12 tahun namun belum berumur 18 tahun dan anak tersebut belum menikah yang diduga telah melakukan tindak pidana.

Purniati (2003: 2) menjelaskan bahwa ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu:

- 1) *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah;
- 2) *Juvenile Delinquence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, baik itu sebagai korban maupun saksi dalam suatu tindak pidana. Ada juga perbedaan dari perilaku atau perbuatan melakukan tindakan hukum anak atau orang dewasa berbeda karena hal yang dilakukan oleh anak bisa saja perbuatan yang melawan hukum namun bagi orang dewasa hal tersebut bukan perbuatan yang melawan hukum dan sebaliknya.

Terdapat beberapa perbedaan dari anak yang berkonflik dengan hukum dengan pelaku orang dewasa hal tersebut dapat dilihat dari perbedaan dari segi pemidanaannya, Pasal 71 ayat (1) UU SPPA menyatakan bahwa:

“Pidana pokok untuk anak yang berhadapan dengan hukum antara lain:

- 1) Pidana peringatan;
- 2) Pidana dengan syarat;
 - a) Pembinaan di luar lembaga;
 - b) Pelayanan masyarakat; atau
 - c) Pengawasan
- 3) Pelatihan kerja;
- 4) Pembinaan dalam lembaga; dan
- 5) Penjara.

Sedangkan dalam pasal 10 KUHP pidana pokok disebutkan sebagai berikut:

- 1) Pidana mati
- 2) Pidana penjara
- 3) Kurungan, dan
- 4) Denda

Hal tersebut jelas bahwa dalam pemidanaan anak yang berkonflik dengan hukum dengan pelaku pidana orang dewasa berbeda. Bagi pelaku pidana dewasa hukuman mati adalah hukuman pidana terakhir sedangkan anak yang berkonflik dengan hukum penjara adalah pilihan terakhir dan tidak diperbolehkan adanya hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati bagi anak.

Selain itu, perbedaan lain adalah proses penahanan dalam proses penahanan terdapat proses penyidikan, penuntutan dan terakhir adalah proses peradilan dalam proses tersebut untuk anak yang berkonflik dengan hukum lebih singkat dibandingkan dengan orang dewasa. Selama proses tersebut anak juga harus didampingi oleh orangtua atau walinya, Balai Pengawasa, Pelayanan Sosial dan pihak lainnya. Terlihat berbeda dengan proses orang dewasa dalam proses tersebut yang harus melibatkan kuasa hukum atau bantuan hukum.

Proses persidangan juga berbeda dalam persidangan hukum anak hakim di larang menggunakan atribut kedinasannya dalam persidangan dan persidangan juga dilakukan secara tertutup namun untuk persidangan orang dewasa hakim menggunakan wajib atau harus menggunakan atribut kedinasannya dan persidangan dilakukan secara terbuka atau umum.

Pada dasarnya anak tidak dapat melindungi sendiri dari ancaman ataupun tindak kekerasan, yang dapat menyebabkan kerugian fisik ataupun mental bagi si anak dalam kehidupan sosialnya. Sehingga dalam hidupnya anak wajib dibantu untuk melindungi dirinya khususnya dalam proses pidana. Anak wajib dilindungi segi perundang-undangan agar tidak menimbulkan kerugian mental dan fisik dalam kehidupan sosialnya sehingga perlindungan tersebut disebut sebagai perlindungan hukum yuridis (*legal protection*)

Dalam proses peradilan pidana anak dari penyidikan sampai mengadili wajib dilakukan oleh pejabat yang sudah terdidik khusus yang mengetahui tentang anak. Dalam prosesnya juga harus adil dengan memerhatikan prinsip perlindungan anak serta menjunjung tinggi harkat dan martabat anak. Diharapkan penegakan hukum dapat melaksanakan dengan jujur dan memiliki pengetahuan tentang perasaan manusia walaupun tidak ahli dalam bidang hukum.

Dalam Pasal 2 UU SPPA menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. non diskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. Penghindaran pembalasan.

Penyelenggaraan peradilan pidana prinsip yang harus dipegang teguh dalam menangani anak yang berkonflik, hal ini merupakan usaha kesejahteraan bagi anak dengan tujuan untuk memberikan jaminan bagi anak tersebut bahwa mereka tetap diperlakukan sesuai dengan lingkungannya. SPPA sudah pasti berbeda dari proses peradilan pidana orang dewasa. Dalam proses peradilan pidana yang dilakukan untuk anak dilakukan dengan segala hal yang menyangkut kepentingan anak dalam pemeriksaan dan pemutusan perkara, serta menekankan pada kepentingan anak. Unsur dalam peradilan pidana anak antara lain

- 1) Penyidik Anak;
- 2) Penuntut Umum Anak;
- 3) Hakim Anak;
- 4) Petugas Pemasyarakatan Anak

Dalam proses peradilan pidana pemberian hak-hak anak mempunyai faktor pendukung dan penghambat. Dalam proses peradilan pidana pemberian hak-hak anak didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Dasar pemikiran Pancasila, UUD 1945, garis besar haluan negara, ajaran agama nilai sosial positif mengenai anak, norma-norma (deklarasi hak-hak anak, undang-undang kesejahteraan anak).
- 2) Berkembangnya kesadaran bahwa permasalahan anak adalah permasalahan nasional yang harus ditangani sedini mungkin secara bersama-sama, intersektoral, interdisipliner, interdepartemenal.
- 3) Penyuluhan, pembinaan, pendidikan dan pengajaran mengenai anak termasuk pengembangan mata kuliah hukum perlindungan anak, usaha-usaha perlindungan anak, meningkatkan perhatian terhadap kepentingan anak.

- 4) Pemerintah bersama-sama masyarakat memperluas usaha-usaha nyata dalam menyediakan fasilitas bagi perlindungan anak.

Berbagai faktor penghambat dalam usaha pengembangan hak-hak anak dalam peradilan pidana, adalah:

- 1) Kurang adanya pengertian yang tepat mengenai usaha pembinaan, pengawasan dan pencegahan yang merupakan perwujudan usaha-usaha perlindungan anak.
- 2) Kurang keyakinan hukum bahwa permasalahan anak merupakan suatu permasalahan nasional yang harus ditangani bersama karena merupakan tanggung jawab nasional.

Dalam membentuk peraturan tentang peradilan pidana anak yang didasari dengan hak-hak anak dalam pembentukannya. Asas ketentuan dasar hukum acara pidana dalam UU SPPA meliputi:

- 1) Asas belum dewasa

Asas belum dewasa dapat membentuk kewenangan dalam penentuan batas usia bagi anak selain itu juga dapat menjadi syarat dalam memnrukan seseorang dapat diproses secara pidana anak atau tidak. Dalam UU SPPA juga berisi mengenai pertanggungjawaban pidana yang dilakukan anak, yang mana dalam Pasal 1 angka (3) dijelaskan bahwa “anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang sudah berumur 12 tahun namun belum berumur 18 tahun yang masih diduga telah melakukan tindakan pidana”.

- 2) Asas keleluasaan pemeriksaan

Asas tersebut maksudnya adalah memberikan penyidikan, penuntut umum, hakim dan petugas keleluasan dalam melaksanakan upaya tindakan dengan agar masih berjalannya hak bagi anak.

3) Asa pembimbingan kemasyarakatan

Kedudukan asas tersebut diartikan sebagai pekerja sosial yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU SPPA. Keutamaan asas ini adalah ketidakmampuan anak dalam mengikuti proses peradilan. Adanya UU SPPA diharapkan menjadi hukum acara pidana anak yang diposisikan dalam ketentuan asas *lex specialis de rogat lex generalis*.

Dalam membicarakan anak yang berhadapan dengan hukum didasari pada dua pihak yaitu pelaku anak dan korban anak tindak pidana. Pengertian anak berhadapan hukum merupakan anak yang sudah berusia 12 tahun namun belum berusia 18 tahun yang mana disangka, diduga, didakwa, ataupun telah dijatuhi pidana karena telah melakukan perbuatan tindak pidana. Herlina (2014: 17) berpendapat bahwa anak yang berhadapan dengan hukum sebagai anak yang terpaksa mengikuti sistem pengadilan pidana dikarenakan disangka atau didakwa dan dinyatakan telah terbukti melakukan pelanggaran hukum, anak yang menjadi korban akibat suatu pelanggaran hukum yang telah dilakukan orang atau sekelompok orang kepadanya, dan anak yang melihat atau mendengar sehingga mengetahui peristiwa suatu pelanggaran hukum. Berdasarkan penjelasan herlina tersebut maka dapat disimpulkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum dibagi menjadi tersangka atau pelaku, korban, dan saksi suatu tindak pidana.

Anak sebagai tersangka atau pelaku dalam tindak pidana atau biasa disebut anak yang berkonflik dengan hukum merupakan anak yang telah didakwa disangka atau dinyatakan melakukan pelanggaran hukum sehingga memerlukan suatu perlindungan dalam sistem peradilanannya. Konflik dalam penjelasan tersebut

memiliki arti tersendiri yaitu bahwa adanya suatu kejadian atau peristiwa yang bertentangan dengan kehidupan yang ada sampai bisa disebut sebagai permasalahan. Maka, anak yang berkonflik dengan hukum memberikan pengertian bahwa anak yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan menjadi masalah serta menimbulkan korban.

Anak yang berkonflik dengan hukum sendiri juga disebut sebagai kenakalan anak atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai *juvenile delinquency* artinya adalah anak yang cacat sosial. Para ahli mendefinisikan *Juvenile delinquency* berbeda-beda, seperti Atmasasmita (1997:15) menyatakan bahwa *delinquency* merupakan perbuatan anak yang dianggap menyimpang dari peraturan atau ketentuan hukum yang berlaku pada suatu negara sehingga masyarakat menganggap bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela. Sedangkan Soetedjo dan Melani (2013:9) berpendapat bahwa kenakalan anak juga diambil dari istilah *juvenile delinquency* namun pengertian kenakalan anak tersebut berbeda dengan Pasal 489 KUHPidana dimana *Juvenile* diartikan sebagai *youngm* anak-anak, anak muda (remaja), karakteristik anak muda dalam periode remaja sedangkan *delinquency* diartikan sebagai *doing wrong*, terabaikan yang artinya dapat luas menjadi jahat, kriminal, melanggar aturan, mengacau, membuat keributan, tidak dapat diperbaiki, durjana dan lain sebagainya.

Soetedjo dan Melani (2013: 12-14) menyatakan bahwa tingkah laku yang menjurus kepada masalah *Juvenile Delinquency* yaitu:

- 1) Mengganggu keamanan dan membahayakan diri sendiri serta orang lain dalam berlalu lintas seperti kebut-kebutan di jalanan.

- 2) Membuat kekacauan atau mengganggu ketentraman lingkungan dan masyarakat, hal ini merupakan tingkah yang didasari karena energy yang berlebihan serta dorongan yang tidak dapat dikendalikan yang dilakukan dengan meneror warga dengan berperilaku urakan atau ugal-ugalan.
- 3) Tawuran atau perkelahinan yang dilakukan antar sekolah, geng, kampung atau kelompok yang terkadang bahkan bisa memakan korban jiwa.
- 4) Bolos sekolah dan biasanya yang dilakukan hanya bergelandangan atau di tempat persembunyian yang biasanya melakukan hal-hal yang melanggar hukum atau tindakan asusila.
- 5) Melakukan tindakan kriminal seperti memeras, mengintimidasi, mengancam, mengganggu, merampok, merampas, merampok, menyerak, melakukan pembunuhan, mencekik, meracun, atau tindakan pelanggaran dengan kekerasan lainnya.
- 6) Mengadakan pesta dengan berhubungan seks, dan minum-minuman keras dan bias ajika berlebihan akan membuat kekacauan pada lingkungan sekitar.
- 7) Melakukan pemerkosaan, pelecehan seksual, membunuh dengan suatu alasan atau karena perasaan, depresi, kesepian, balas dendam, penolakan cinta yang membuat kecewa, dan lain sebagainya.
- 8) Kecanduan penggunaan narkoba seperti opium, ganja, dan obat-obat terlarang lainnya.
- 9) Tindakan pelecehan seksual yang biasanya dalam melakukan hubungan seks dilakukan secara terang-terangan, tanpa malu, dan dilakukan secara kasar yang dilakukan karena hiperseksual, dan biasanya dilakukan dengan cara seolah menuntut haknya.

- 10) Gangguan seksualitas lain seperti homoseksual, erotisme, dan oral yang dilakukan dengan cara sadis.
- 11) Melakukan perjudian atau taruhan lainnya yang bisa menyebabkan tindakan kriminal.
- 12) Adanya komersialisasi seks, penggugaran pada janin, dan pembunuhan pada bayi yang dilakukan oleh ibu yang belum menikah.
- 13) Melakukan kekerasan jalanan, penculikan, pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak.
- 14) Perbuatan a-sosial dikarenakan adanya gangguan jiwa pada anak.
- 15) Tindakan kejahatan dikarenakan kerusakan mental pada anak yang menyebabkan anak tidak dapat mengontrol tindakannya.
- 16) Tingkahlaku yang menyimpang karena adanya kerusakan pada anak dengan tuntutan kompensasi dikarenakan adanya organ interior.

Menurut Kartono (1992: 7) sendiri *delinquency* mempunyai arti suatu perbuatan penyerangan, melanggar, kejahatan, dan keganasan yang dilakukan orang anak muda yang berusia di bawah 22 tahun. Sama halnya yang dinyatakan oleh Widoyanti (1984:48) yang menyatakan jika kenakalan remaja adalah golongan yang sama namun perbuatannya yang berbeda-beda yang dilakukan pada waktu yang berbeda pula. Kenakalan remaja sendiri merupakan pengertian yang digunakan dengan tujuan untuk menggambarkan tingkah laku dari anak atau remaja yang menyimpang dan tidak baik. Berdasarkan pengertian tersebut hampir semua tingkah laku remaja yang menyimpang dari kehidupan yang di lingkungan masyarakatnya disebut sebagai kenakalan remaja, bahkan anak yang melakukan tindak pidana juga disebut kenakalan remaja.

Politik kriminal disebut sebagai suatu kebijakan yang secara rasional dan dilakukan dengan tujuan untuk menanggulangi kejahatan yang ada. Kebijakan ini memiliki lingkup yang sangat luas. Dasarnya kejahatan sendiri adalah masalah yang dilakukan oleh manusia dalam lingkup sosial dan menyebabkan masalah sosial, masalah sosial yaitu kejahatan dinamis yang tumbuh terus menerus sesuai dengan kehidupan masyarakat.

Kebijakan dalam menanggulangi adanya kenakalan anak didasari dengan dengan asas-asas yang berbeda dengan orang dewasa. Dilakukan dengan memodifikasi penanggulangan penal dan nonpenal, dalam kebijakan politik kriminal bagi kenakalan anak merupakan kebutuhan dalam memadukan antara politik sosial dan penegakan hukum dalam penanggulangan kejahatan. Dalam menanggulangi perilaku kenakalan anak maka diperlukan adanya modifikasi antara politik kesejahteraan masyarakat dan politik perlindungan masyarakat secara umum.

Menurut Widoyanti (1984: 48) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tindak pidana anak adalah

- 1) Keluarga yang hancur dan tidak harmonis
- 2) Ekonomi keluarga, yang membuat anak di merasa tidak berkecukupan
- 3) Sikap masyarakat pada anak
- 4) Kepadatan penduduk yang menyebabkan lingkungan masyarakat yang tidak sehat
- 5) Pendidikan yang kurang diterima oleh anak
- 6) Banyaknya film, televisi, dan hiburan lain yang membuat anak mudah mengikutinya.

- 7) Anak merasa sendiri karena disingkirkan oleh teman-temannya
- 8) Sifat anak yang sudah seperti itu sehingga tanpa adanya pembinaan dari orangtua atau wali sehingga anak semakin menjadi-jadi.

Anak yang diduga atau telah melakukan suatu tindak pidana maka perlu diberikan perlindungan hukum. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan penerus bangsa di masa yang akan datang. Perlindungan hukum bagi anak sendiri juga harus sesuai dengan peraturan hukum yang ada, diperlukannya perlindungan bagi anak karena anak memiliki keterbatasan baik mental ataupun fisik dibandingkan dengan orang dewasa.

Dalam UU Perlindungan Anak, menyebutkan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum, pandangan masyarakat atas anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang telah melakukan kejahatan. Padahal dalam UU Perlindungan Anak telah dijelaskan bahwa: “perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana”.

Anak memerlukan perlindungan hukum walaupun mereka telah melakukan tindak pidana. Menurut Irwanto (2016:4) prinsip perlindungan antara lain:

- 1) Berjuang sendirian tidak dapat dilakukan oleh anak karena pada dasarnya anak merupakan modal dsri keberlangsungan hidup bangsa dan keluarganya sehingga hak-haknya perlu dilindungi.
- 2) Kepentingan terbaik bagi anak, prinsip ini harus dilakukan pada setiap memberikan keputusan yang berhubungan dengan anak.

3) Ancaran daur kehidupan, prinsip ini mengacu pada pemahaman atas perlindungan yang harus dilakukan sejak dini hingga terus-menerus.

4) Lintas Sektoral

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor yang makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung.

Sehubungan dengan masalah perlindungan terhadap hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum, dalam Pasal 40 Konvensi Hak Anak dinyatakan bahwa:

“Negara-negara peserta mengakui hak setiap anak yang disangka, dituduh atau dinyatakan melanggar hukum pidana, untuk diperlakukan sesuai dengan peningkatan perasaan anak atas martabat dan harga dirinya, dengan memperkuat penghargaan anak pada hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar orang lain dan mempertimbangkan usia serta keinginan untuk meningkatkan reintegritas anak dan menciptakan anak yang berperan konstruktif dalam masyarakat”.

Pasal 37 Konvensi Hak-Hak Anak ditegaskan bahwa negara harus menjamin perlindungan bagi anak maksudnya adalah negara dilarang melakukan penyiksaan, menindak hukuman atau memberikan hukuman yang kejam seperti hukuman mati, penjara seumur hidup serta penahanan yang dilakukan semena-mena tanpa memikirkan kebebasan hak anak. Dalam membrikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum maka pemerintah Indonesia menerapkan perundang-undangan terkait dengan perlindungan anak seperti Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 66 menjelaskan mengenai masalah perlindungan bagi anak yang berkonflik yang dinyatakan bahwa terkait dengan perlindungan terhadap anak menurut UU

SPPA anak yang melakukan tindak pidana tidak harus mendapatkan hukuman pidana penjara. Hal tersebut juga dijelaskan di dalam UU SPPA Pasal 71 bahwa dalam menindak anak yang berkonflik dalam hukum harus dilakukan dengan pengembalian orang tua asuh atau menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan serta pelatihan kerja di organisasi sosial.

Selanjutnya ketentuan yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2002 jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ada beberapa pasal yang berhubungan dengan masalah perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.

Pasal 1 angka 2

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pasal 1 angka 15

“Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya”.

Pasal 2

“Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak meliputi:

- a) Non diskriminasi
- b) Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
- d) Penghargaan terhadap pendapat anak

Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Pasal 59

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.

- (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
- 1) Anak dalam situasi darurat;
 - 2) Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - 3) Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - 4) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - 5) Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - 6) Anak yang menjadi korban pornografi;
 - 7) Anak dengan HIV/AIDS;
 - 8) Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - 9) Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - 10) Anak korban kejahatan seksual;
 - 11) Anak korban jaringan terorisme;
 - 12) Anak Penyandang Disabilitas;
 - 13) Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - 14) Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - 15) Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Pasal 64

Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a) Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b) Pemisahan dari orang dewasa;
- c) Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d) Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e) Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f) Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g) Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h) Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i) Penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- j) Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k) Pemberian advokasi sosial;
- l) Pemberian kehidupan pribadi;
- m) Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n) Pemberian pendidikan;
- o) Pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p) Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan.

Maka dari itu perlindungan terhadap anak diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup anak yang berkonflik dengan hukum.

Asas-asas dalam peradilan anak yang peraturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut (Gultom, 2012:195):

1) Pembatasan Umur Anak

Orang yang disidangkan dengan acara Pengadilan Anak, ditentukan secara limitatif, yakni minimal 12 tahun sampai maksimal 18 tahun, dan belum pernah kawin.

2) Ruang Lingkup Masalah Dibatasi

Pengadilan Anak hanya memeriksa perkara Anak Nakal yaitu diantaranya bertugas memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara anak nakal.

3) Suasana Pemeriksaan Kekeluargaan

Dengan suasana kekeluargaan diharapkan anak dapat mengutarakan perasaannya, peristiwanya, latar belakang kejadiannya secara jujur, terbuka, tanpa tekanan dan rasa takut. Karena itu hakim, penuntut umum, dan penasehat umum tidak memakai toga.

4) Mengharuskan Splitsing Perkara

Jika anak melakukan tindak pidana bersama orang dewasa, maka persidangan antara orang dewasa dan anak harus dipisah, baik yang berstatus sipil maupun militer. Jadi terdapat splitsing perkara antara keduanya.

5) Ditangani Pejabat Khusus

Perkara anak nakal ditangani pejabat khusus yaitu penyidik anak, penuntut umum anak, dan hakim anak yang memilihi keahlian dan minat khusus untuk peduli terhadap perkara anak.

6) Diperiksa Hakim Tunggal

Pada dasarnya persidangan anak diperiksa oleh hakim tunggal yang memahami masalah anak di tingkat pertama, banding maupun kasasi. Hakim ini harus memiliki sertifikat dan telah mengikuti pelatihan tentang pengadilan anak selain itu hakim tunggal diharapkan memiliki perhatian lebih terhadap perkara anak.

7) Dalam Acara Pemeriksaan Tertutup

Acara pemeriksaan di pengadilan anak dilakukan secara tertutup demi kepentingan anak sendiri untuk menghindari stigmatisasi yang buruk kepada anak.

8) Masa Penahanan Lebih Singkat

Masa penahanan anak lebih singkat dibanding dalam KUHAP, hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan anak karena dengan penahanan yang tidak begitu lama maka tidak akan berpengaruh besar pada perkembangan fisik, mental dan sosial anak.

9) Diperlukan Kehadiran Orang Tua / Wali / Orang Tua Asuh

Kehadiran orang tua atau wali dirasa sangat penting sebab kehadiran mereka diharapkan anak menjadi lebih terbuka, lebih jujur, dapat menyampaikan tanpa ada tekanan. Selain itu orang tua juga dapat mendengarkan keluhan-keluhan yang dirasakan sang anak.

10) Hukuman Lebih Ringan

Pidana pokok dapat berupa penjara, kurungan, denda atau pengawasan, dan tidak dapat digabung melainkan hanya salah satu. Selain itu juga terdapat pidana tambahan, yakni perampasan barang-barang tertentu atau pembayaran

ganti rugi. Pidana penjara bagi anak nakal paling lama setengah dari maksimal orang dewasa. Hukuman maksimal anak nakal adalah 10 tahun.

Perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang awalnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perbedaan utama dalam pembaharuan tersebut adalah:

- 1) Pergeseran paradigma dari retributif, menjadi paradigma *restorative*

Teori retributif melegitimasi pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan seseorang. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang amoral dan asusila di dalam masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus dibalas dengan menjatuhkan pidana. Tujuan pemidanaan dilepaskan dari tujuan apapun, sehingga pemidanaan hanya mempunyai satu tujuan, yaitu pembalasan (Mulyadi, 2008:4). Sedangkan Keadilan Restoratif merupakan filsafat, proses, ide, teori dan intervensi yang menekankan dalam memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh pelaku kriminal, sehingga keadilan restoratif dipandang sebagai pendekatan yang lebih manusiawi dimana selalu mengedepankan pengampunan, penyembuhan, pemulihan yang saling berkaitan satu sama lainnya. (Mantle, *et al*, 2005:3)

- 2) Adanya kewajiban dalam tiap tahap pemeriksaan untuk melaksanakan diversi

Dalam *The Beijing Rules* pada Rules 11, diversi merupakan suatu upaya pengalihan penyelesaian perkara yang ada diluar proses peradilan formal dengan tujuan menghindarkan anak dari stigmatisasi bagi anak dari

proses peradilan anak. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Upaya pengalihan atau ide diversi ini, merupakan penyelesaian yang terbaik yang dapat dijadikan formula dalam penyelesaian beberapa kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Dengan langkah kebijakan non penal anak pelaku kejahatan, yang penanganannya dialihkan di luar jalur SPPA, yaitu melalui caracara pembinaan jangka pendek atau cara lain yang bersifat keperdataan atau administratif.

Ketentuan diversi dan keadilan restoratif dalam pelaksanaannya melibatkan pihak ketiga di dalam penyelesaian masalah antara anak pelaku dan anak korban dalam tindak pidana tersebut, dengan melibatkan masing-masing keluarga mereka, serta pihak-pihak lain, dengan tujuan proses penyelesaian perkara diusahakan agar anak pelaku tindak pidana jauh dari proses pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana.

3) Pembatasan umur anak yang berbeda

Pembatasan usia anak adalah hal yang penting dalam kasus kenakalan anak, karena digunakan untuk menentukan status hukum mereka, apakah mereka dapat dikategorikan sebagai anak atau orang dewasa. Kepastian dalam hukum mengenai hal ini penting bagi penegakan hukum di garis depan untuk menghindari kesalahan dalam penangkapan, penyidikan, penuntutan, atau penilaian. Hal tersebut penting karena berhubungan dengan hak asasi manusia.

Mengenai batasan usia dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 ayat (1) selaras dengan Pasal 4 ayat (1). Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa: Seorang anak adalah orang dalam kasus kenakalan anak yang telah mencapai delapan tahun tua tapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah menikah. Sedangkan Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa: Keterbatasan anak nakal yang dapat diajukan ke pengadilan anak berada pada setidaknya 8 tahun namun telah mencapai 18 tahun dan belum pernah menikah.

Pembatasan usia di atas menunjukkan bahwa seseorang yang dapat dianggap anak yang dapat dibawa ke pengadilan terbatas antara delapan dan 18 tahun. Seorang anak berusia di bawah 18 tahun tetapi yang sudah menikah harus diperlakukan sebagai orang dewasa bukan anak. Karena itu, dia tidak akan diproses berdasarkan pada Undang-Undang Pengadilan Anak, namun berdasarkan KUHP (Mardite, 2006:5). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka batas umur anak ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 yaitu Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

- 4) Adanya peran masyarakat dalam mewujudkan perlindungan terhadap anak yang tertera dalam Pasal 93. Masyarakat dapat melaporkan apabila terjadi pelanggaran, berpartisipasi dalam diversi, hingga ikut memantau rehabilitasi anak.
- 5) Diaturinya juga perlindungan anak bagi korban maupun saksi yang tertera dalam Pasal 89 sampai dengan Pasal 91.

- 6) Adanya beberapa pembaharuan yaitu:
- a) Sebelumnya disebut dengan Lapas Anak namun namanya diubah agar tidak menakutkan dan sekarang menjadi LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) yaitu tempat anak menjalani masa pidana.
 - b) Sebelumnya selama anak dalam proses peradilan maka di tempatkan di Rutan yang masih bercampur dengan orang dewasa. Demi melindungi anak maka dibuatlah tempat khusus bagi anak yaitu LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara) yaitu tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung.
 - c) Hadirnya LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) yaitu tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak seperti rehabilitasi bagi korban agar tidak trauma serta bagi pelaku agar perilakunya dapat berubah ke arah yang lebih baik.

d. Perlindungan Hukum Anak

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yakni sejak dari janin semasih dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun, karena anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita bangsa, maka agar anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah: segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berpartisipasi secara optimal sesuai

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dilakukan melalui (Prinst, 1997: 163):

- 1) Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga
- 2) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- 3) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial.
- 4) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara

Semakin banyak anak yang menjadi korban dalam kasus-kasus hukum seperti penculikan, kekerasan, penganiayaan, pemerkosaan dan kasus-kasus hukum lainnya, maka dari aspek kesejahteraan dan perlindungan anak selain pemerintah, masyarakat juga berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak. Peran masyarakat tersebut dapat dilakukan oleh perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan dan media massa.

2. Konsep Tindakan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

a. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan anak di Indonesia adalah bagian *lex specialis derogat lex generalis* dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Dengan demikian,

konsekuensi logis, substantif kebijakan legislatif dalam peradilan anak, nyaris identik, tidak jauh berbeda dengan substantif kebijakan legislatif dalam peradilan pidana umum.

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal (1) angka 1.

Undang-Undang SPPA menggantikan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang tentang Pengadilan Anak tersebut digantikan karena belum memperhatikan dan menjamin kepentingan si anak, baik anak pelaku, anak saksi, dan anak korban. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak hanya melindungi anak sebagai korban, sedangkan anak sebagai pelaku terkadang diposisikan sama dengan seperti pelaku orang dewasa.

Undang-Undang SPPA ini menekankan kepada proses diversi dimana dalam proses peradilan ini sangat memperhatikan kepentingan anak, dan kesejahteraan anak. Pada setiap tahapan yaitu penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan wajib mengupayakan diversi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang SPPA.

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak. (Wahyudi, 2011:35).

SPPA ini menjadikan para aparat penegak hukum untuk terlibat aktif dalam proses menyelesaikan kasus tanpa harus melalui proses pidana sehingga menghasilkan putusan pidana. Penyidik kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum yang dimaksudkan dalam Undang-Undang SPPA ini, selain itu ada penuntut umum atau jaksa, dan ada hakim. Dalam Undang-Undang SPPA ini juga mengatur lembaga yang terkait dalam proses diluar peradilan anak misalnya ada Bapas, Pekerja Sosial Profesional, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Keluarga atau Wali Pendamping, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang ikut berperan di dalamnya, dengan Prinsip perlindungan anak, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; pembinaan dan pembimbingan Anak; proporsional; perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir; dan penghindaran pembalasan, Keadilan Restoratif dan Diversi diterapkan dalam SPPA untuk menjaga agar prinsip-prinsip Sistem Peradilan Pidana

b. Pengertian Diversi

Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka atau terdakwa atau pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim (Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Anak). Diversi juga dapat diartikan sebagai pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan

dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.

Penerapan diversifikasi dapat dilakukan dalam semua tingkatan-tingkatan pemeriksaan, dimaksud untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut. Oleh karena itu tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif maka, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversifikasi demi kepentingan terbaik bagi anak dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban

Dari titik tolak konteks di atas, manfaat pelaksanaan program diversifikasi bagi pelaku anak menurut Wahyudi (2011: 60), dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Membantu anak-anak belajar dari kesalahannya melalui intervensi selektif mungkin.
- 2) Memperbaiki luka-luka karena kejadian tersebut, kepada keluarga, korban dan masyarakat.
- 3) Kerja sama dengan pihak orang tua, pengasuh dan diberikan nasehat hidup sehari-hari.
- 4) Melengkapi dan membangkitkan anak-anak untuk membuat keputusan untuk bertanggungjawab.
- 5) Berusaha untuk mengumpulkan dana untuk restitusi kepada korban.

- 6) Memberikan tanggung jawab anak atas perbuatannya dan memberikan pelajaran tentang kesempatan untuk mengamati akibat-akibat dan efek kasus tersebut.
- 7) Memberikan pilihan bagi pelaku untuk berkesempatan untuk menjaga agar tetap bersih atas catatan kejahatan.
- 8) Mengurangi beban pada peradilan dan lembaga Negara.
- 9) Pengendalian kejahatan anak.

Adapun tujuan diversi berorientasi kepada dimensi mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindari anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Tujuan diversi tersebut merupakan implementasi dari keadilan restoratif yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana.

Kemudian syarat dilakukan diversi sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 9 UU SPPA dapat dilakukan apabila tindak pidana yang dilakukan diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana, mendapatkan persetujuan korban dan atau keluarga anak korban, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat dan adanya kesediaan anak dan keluarganya.

Dalam UU SPPA, proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan

melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan orang tuanya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Selain itu juga, dalam hal diperlukan musyawarah tersebut juga dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial atau masyarakat.

Proses diversi wajib memperhatikan:

- 1) Kepentingan korban
- 2) Kesejahteraan dan tanggungjawab anak
- 3) Penghindaran stigma negatif
- 4) Penghindaran pembalasan
- 5) Keharmonisan masyarakat dan
- 6) Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum

Dalam melakukan diversi hendaknya harus dipertimbangkan tentang kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Kemudian syarat kesepakatan diversi ada dua kemungkinan, yaitu:

- 1) Harus mendapatkan persetujuan korban atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Hasil kesepakatan diversi dalam konteks ini dapat berbentuk antara lain perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua atau walinya, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) paling lama 3 (tiga) bulan, atau pelayanan masyarakat.
- 2) Tidak harus mendapat persetujuan korban atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya untuk tindak pidana yang berupa

pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. Terhadap aspek ini, kesepakatan diversi dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Kemuadian kesepakatan diversi bentuknya dapat berupa pengembalian kerugian dalam hal ada korban, rehabilitasi medis dan psikososial, penyerahan kembali kepada orang tua, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di Lembaga Pendidikan atau Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) paling lama 3 (tiga) bulan, atau pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

c. Tujuan Diversi

Tujuan dari diversi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Ada kesamaan antara tujuan diskresi dan diversi. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut

Sedangkan dalam menurut Pasal 6 UU Nomor 11 Tahun 2012 Diversi bertujuan untuk:

- 1) Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- 2) Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- 3) Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- 4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan

5) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Kepolisian dengan konsep diversi dengan tujuan untuk sifat *avonturir* anak, dalam memberikan hukuman untuk anak dilakukan semata untuk memperbaiki anak tersebut. Melakukan diversi adalah untuk menghindari adanya kekerasan dan apabila dihukum maka tidak efektif. Konsep diversi juga didasarkan pada kenyataan proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana.

Selain itu, diversi juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Penjaran atau sekarang disebut sebagai lembaga pemasyarakatan (lapas) tidak hanya dihuni oleh orang-orang yang melakukan tindakan perampokan, pencurian, pembunuhan atau pemerkosaan saja tetapi juga ditempati oleh orang-orang yang melakukan pemakai, pengedar, kurir, dan bandar narkoba serta pada penjudi.

Selain itu karena para penegak hukum juga memberantas KKN sehingga penghuni Lembaga Perasyarakatan juga dari berbagai profesi seperti mantan pejabat negara, direktur bank, intelektual atau professional banker, pengusaha,

atau pejabat lain yang memiliki profesionalisme dan kompetensi tinggi, sehingga dalam hal ini dikatakan bahwa penghuni Lapas bervariasi baik usia, profesi, kasus tindak pidana ataupun penjatuhannya.

Diversi sendiri merupakan usaha untuk mengajak masyarakat agar dapat menaati hukum negara, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan dengan pertimbangan rasa adil sebagai prioritas utama selain memberikan kesempatan untuk pelaku dalam menempuh jalur nonpidana seperti kerja sosial, ganti rugi, atau dengan pengawasan orang tua. Tindakan diversi ini dilakukan tidak bertujuan untuk mengabadikan hukum ataupun keadilan tetapi hanya berusaha dengan unsur pemaksaan agar membuat orang dapat menaati hukum. Dalam hal ini prinsip pelaksanaan diversi adalah dilakukan dengan mewujudkan keadilan dan penegakan dengan benar dengan meminimalkan tindakan pemaksaan pidana.

d. Pengaturan tindakan Diversi

Tindakan Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*) tiga jenis pelaksanaan program diversi dilaksanakan yaitu:

- 1) Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*) yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggungjawab pengawasan atau

pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.

- 2) Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan
- 3) Menuju proses *restorative justice* atau perundingan yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat, pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

Proses diversi dilakukan dalam upaya memberikan kesempatan untuk mengeluarkan atau mengalihkan suatu kasus tergantung landasan hukum atau kriteria yang ada dalam prakteknya. Di lingkungan juga terlihat ada suatu model informal yang tidak meletakkan kasus satu persatu secara formal (seperti polisi memutuskan untuk tidak melanjutkan penyidikan, berpikir untuk berdamai) keadaan ini merupakan satu tindakan untuk melakukan perubahan, pengembalian, penyembuhan pada korban dan pertanggungjawaban pelaku. Secara konteks variabel seperti pengorganisasian, kedudukan dan faktor situasi juga relevan dalam pelaksanaan diversi.

3. Karakteristik Kajian Perspektif Sosiologi Hukum

Undang-undang yang mengatur tentang pelaku anak yang berkonflik dengan hukum adalah Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sitem peradilan pidana anak yang mulai diberlakukan 30 Juli 2014 sebagaimana disebut dalam ketentuan penutupnya, yaitu dalam pasal 108. Undang-undang sistem peradilan anak nomor 11 tahun 2012 merupakan pengganti dari Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang peradilan anak yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik secara komprehensif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Substansi yang paling mendasar dalam Undang-undang nomor 11 ahun 2012 adalah adanya kewajiban bagi penyidik anak, jaksa penuntut umum anak dan hakim anak yang memeriksa perkara anak untuk mengupayakan tindakan diversifikasi pelaku anak untuk mewujudkan *restorative justice*, yang melibatkan korban dan masyarakat .perilaku menyimpang yang dilakukan anak dan sistem penanganan anak yang berkonflik dengan hukum tidak sekedar persoalan hukum positif semata, tapi yang lebih substansial adalah persoalan yang kompleks, yang terkain dengan persoalan sosial lainnya. Pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk memahami sistem penyelesaian anak yang yang berkeadilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum melalui tindakan diversifikasi sebagai model perlindungan hukum bagi anak yang merupakan komponen masyarakat.

Secara konseptual dan teoritis, tidak ada definisi yang tunggal terkait dengan dengan perspektif sosiologi hukum. Namun perspektif sosiologi hukum ingin mengkaji dan memahami realitas hukum dari perspektif ilmu-ilmu sosial khususnya sosiologi atau sosial tentang hukum. Kajian sosiologi hukum adalah

kajian yang berobyek fenomena hukum, tetapi menggunakan optik ilmu sosial dari teori-teori sosiologi. Ali (1998:9) mendefinisikan kajian sosiologi hukum adalah suatu kajian yang objeknya fenomena hukum, tetapi menggunakan topik ilmu sosial dan teori-teori sosiologis. Kajian sosiologis huku ini masuk dalam kajian empiris, yang mana dalam kajian ini memandang hukum sebagai kenyataan yang mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur dan lain-lain, atau bisa juga dikatakan bahwa kajian empiris mengkaji *law in action* yang mana dunianya adalah yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat atau kenyataannya (Das Sein) dan bukan apa yang seharusnya (das Sollen).

Asumsi dasar dari pendekatan sosiologi hukum adalah bahwa hukum dan masyarakat tidak bisa dilepaskan satu sama lain, sebagaimana yang dikatakan filosof hukum dan politik kelahiran Romawi Markus Tullius Cicero, *Ubi Societas ibi Ius*, dimana ada masyarakat disitu ada hukum, hukum tidak dapatpisahkan dari masyarakat. Kedamaian dan keadilan dari masyarakat hanya bisa dicapai apabila tatanan hukum telah terbukti mendatangkan keadilan dan dapat berfungsi dengan efektif, atau kalimat dalam bahasa latin "*Homo Homini Lupus*" artinya "*man is a wolf to man*", manusia itu serigala bagi manusia lain , namun manusia pada akhirnya manusia selalu mengikatkan diri dengan manusia lainnya, karena manusia adalah makhluk sosial atau *Homo Homini Socius*.

Objek utama dari kajian sosiologi hukum menurut Ali (1998:19) adalah:

- a. Dalam istilah Black (1976: 2-4) mengkaji hukum dalam wujudnya dapat dikatakan sebagai istilah *goverment social control*. Hukum dikaji dalam sosiologi hukum sebagai kaidah yang khusus berlaku serta dibutuhkan untuk menegakan ketertiban di kehidupan masyarakat. Pemerintah menganggap

hukum sebagai dasar rujukan dalam mengendalikan perilaku masyarakat dengan tujuan agar terwujudnya ketertiban masyarakat. Maka, hukum dengan dikaji dengan sosiologi hukum yang dikaitkan dengan pengendalian sosial serta sanksi yang terpaksa dilakukan pemerintah sebagai alat negara.

- b. Persoalan dalam pengendalian sosial dikaji dengan sosialisasi, yaitu proses yang dilakukan dengan cara masyarakat dibentuk sebagai makhluk sosial dengan menyadari eksistensi sebagai kaidah sosial didalam masyarakat seperti kaidah hukum, moral, agama serta sosial yang lain dan dengan dilakukan kesadaran sosial itu pemerintah berharap masyarakat dapat mematuhi. Hal tersebut terlihat jika sosiologi lebih cenderung dilakukan dengan sosialisasi sebagai suatu proses yang didahului dan dijadikan sebagai kondisi awal yang dapat memungkinkan adanya pengendalian sosial yang aktif.
- c. Objek utama dari sosiologi hukum lainnya yaitu stratifikasi, stratifikasi disini merupakan sistem kemasyarakatan, maksudnya membahas tentang dampak stratifikasi sosial terhadap pelaksanaan hukum atau hukum itu sendiri.
- d. Bahasan utama lain dari sosiologi hukum merupakan perubahan, artinya mencakup perubahan dari hukum atau masyarakat yang dapat terjadi adanya timbal balik antara kedua perubahan tersebut.

Soekanto (2002: 26-27) menyatakan kegunaan sosiologi hukum dalam kenyataannya antara lain:

- a. Dalam konteks sosial dapat memberikan kemampuan serta pemahaman terhadap hukum.

- b. Memberikan kemampuan dalam mengadakan analisa terhadap efektifitas hukum dalam masyarakat baik sebagai saran mengubah masyarakat, mengendalikan sosial, dan saran dalam interaksi sosial dalam mencapai keadaan sosial tertentu.
- c. Memberikan kemampuan dalam mengadakan evaluasi dalam keefektifitas hukum di masyarakat.

Menurut peneliti, Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan perilaku menyimpang yang dilakukan anak-anak. Perilaku menyimpang adalah salah satu dari masalah sosial karena dapat membahayakan tegaknya sistem sosial dan mengganggu keteraturan hidup masyarakat. dalam perspektif perilaku menyimpang masalah sosial terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dari berbagai aturan-aturan sosial ataupun dari nilai dan norma sosial yang berlaku. Penggunaan pendekatan yuridis sosiologis adalah jalur baku yang harus di tempuh untuk menangani anak yang melakukan penyimpangan sistem sosial Dalam sosiologi hukum, hukum merupakan kontrol sosial yang berhubungan dengan pembentukan dan pemeliharaan aturan-aturan sosial, hukum berfungsi untuk menciptakan aturan sosial dan sanksi di gunakan sebagai alat untuk mengontrol mereka yang menyimpang dan juga digunakan untuk menakut-nakuti agar orang tetap patuh kepada suatu aturan.

C. Kerangka Teoritik

Kata teori berasal kata theori yang artinya pandangan atau wawasan (Mertokusumo, 2012:4). Theori juga bermakna sebagai pengetahuan dan pengertian yang terbaik (Bernard, dkk, 2010:7). Secara umum teori itu diartikan sebagai pengetahuan yang hanya ada dalam alam pikiran tanpa dihubungkan

dengan kegiatan –kegiatan yang bersifat praktis untuk melakukan sesuatu (Mertokusumo, 2012: 7) . kerangka secara etimologis bermakna garis besar atau rancangan. Teori adalah keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan. Teori berarti penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematikan masalah yang dibicarakan dan teori juga mengandung subyektifitas apabila berhadapan dengan suatu fenomena yang cukup kompleks. Landasan teori terhadap suatu penelitian adalah merupakan dasar-dasar operasional penelitian. Landasan teori dalam suatu penelitian bersifat strategis artinya memberikan realisasi pelaksanaan penelitian (Kaelan, 2005:239).

Untuk mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya, maka kerangka teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori tindakan sosial Max Weber dan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo.

1. Teori Tindakan Sosial Max Weber

Salah satu teori yang berpengaruh dalam menjelaskan tindakan sosial adalah teori aksi (*action theory*). Teori ini memiliki anggapan dasar berkaitan dengan tindakan sosial yaitu “tindakan manusia yang timbul dari kesadarannya sendiri sebagai subyek dari situasi eksternal dalam posisinya sebagai “ obyek “.

Tindakan sosial menurut Max Weber adalah suatu tindakan individu sepanjang tindakan itu mempunyai makna atau arti subyektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain, sehingga suatu tindakan akan dikatakan sebagai Tindakan sosial ketika tindakan tersebut benar-benar diarahkan kepada orang lain. Upe (2008: 90) menyatakan tindakan sosial merupakan tidak yang mempunyai arti subjektif dari pelakunya. Seluruh perilaku tindakan sosial

mempunyai arti subjek bagi yang melakukannya dari yang tertutup sampai terbuka. Tindakan sosial sendiri merupakan perilaku yang bukan perilaku yang kebetulan tetapi tindakan tersebut memiliki makna tertentu.

Emile Durkheim, Tindakan sosial adalah sebagai perilaku yang diarahkan oleh norma-norma dan tipe solidaritas kelompok tempat ia hidup. Karl Max menjelaskan, Tindakan sosial adalah sebagai aktivitas manusia yang berusaha menghasilkan barang, atau menghasilkan karya yang unik maupun untuk mengejar tujuan tertentu. Sedangkan Max Weber mengartikan tindakan sosial sebagai tindakan seseorang yang mempengaruhi individu-individu lainnya dalam masyarakat. Menurut Bento dan Craib (2009: 121), tindakan sosial adalah suatu tindakan yang memiliki makna yaitu ketika individu yang berinteraksi dengan individu lain dan hasilnya individu tersebut dapat mempengaruhi perilaku individu lainnya.

Tindakan diversi pelaku anak didasari nilai-nilai keadilan, nilai perlindungan harkat dan martabat anak, kebahagiaan dan kesejahteraan anak. Ketiga, *affectual (especially emotional)* tindakan efektif atau tindakan yang dipengaruhi emosi, yaitu tipe tindakan yang didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual, tindakan efektif sifatnya spontan, kurang rasional, tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan yang matang, tetapi ditentukan oleh kondisi kejiwaan dan perasaan aktor yang melakukannya. Dalam praktik perasaan kasihan, perasaan prihatin para aktor mendasari Tindakan diversi pelaku anak di wilayah hukum pengadilan Negeri Kepanjen dan Malang. Keempat, tindakan tradisional / tindakan karena kebiasaan, yaitu bahwa dalam tindakan ini, para aktor memperlihatkan perilaku tertentu karena kebiasaan yang diperoleh dari diri

sendiri maupun orang lain, tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan yang matang. Tindakan diversi anak merupakan tindakan lanjutan dari kebiasaan masyarakat Malang apabila ada kejadian yang dilakukan anak, penyelesaiannya secara adat kebiasaan, pelaku anak/keluarganya membayar ganti dan atau tanpa ganti rugi.

Upe (2008: 90) menyatakan bahwa terdapat beberapa asumsi fundamental dari teori aksi atau disebut sebagai *action theory*, yaitu tindakan manusia yang dilakukan dari kesadarannya sendiri sebagai subjek dan situasi dari luar dalam posisinya sebagai objek, sebagai subjek manusia untuk berperilaku atau bertindak dalam mencapai tujuan yang diinginkan, dalam bertindak manusia menggunakan prosedur, metode dan peralatan yang sekiranya cocok untuk mencapai tujuan itu, manusia menilai serta mengevaluasi tindakan yang sedang dilakukan, dan ukuran serta prinsip yang diharapkan muncul atas pengambilan keputusan.

Ritzer (2004: 78) secara khusus menyatakan karakteristik dalam menyusun skema unit dasar dalam tindakan sosial, karakter tersebut adalah adanya individu sebagai aktor, aktor dilihat sebagai pencari dari tujuan tertentu, aktor juga mempunyai cara dan teknik serta alat dalam mencapai tujuan tersebut, dan aktor juga menghadapi beberapa kondisi yang membatasi tindakan dalam mencapai tujuan.

Aktor dibawah kendali norma-norma yang berlaku yang mempengaruhi dalam memutuskan tindakan tindak diversi anak. Aktor mengejar tujuan dalam situasi dimana norma-norma mengarahkan dalam memilih alternatif cara dan alat untuk mencapai tujuan, tetapi putusan akhir ditentukan oleh kemampuan aktor untuk memilih apakah melalui tindakan social diversi untuk tujuan menyelesaikan

kasus anak secara damai atau proses pidana dengan tujuan untuk memenjarakan pelaku anak. Kemampuan inilah yang disebut Parsons sebagai voluntarisme yaitu kemampuan melakukan tindakan dalam arti menetapkan cara atau alat dari sejumlah alternatif yang tersedia dalam penanganan anak yang berkonflik dengan, para aktor (penyidik anak, jaksa penuntut umum anak dan hakim anak) oleh Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA telah ditentukan 2 pilihan sebagai alternatif penyelesaian kasus anak, yaitu pertama: menyelesaikan perkara anak melalui proses non litigasi, seperti tindakan diversi, kedua: perkara anak diselesaikan melalui proses formal dengan prosedur acara pidana anak dengan tujuan menghukum anak dengan pidana penjara.

2. Teori Hukum Progresif Sajipto Raharjo

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah progress yang artinya maju. Hukum progresif berarti hukum yang bersifat maju. Istilah hukum progresif, diperkenalkan oleh Sajipto Rahardjo yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Sajipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri (Raharjo, 2006: 10).

Adapun pengertian hukum progresif adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praktis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia (Raharjo, 2006: 10).

Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

Secara lebih sederhana hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.

Rahardjo mencoba menyoroti kondisi di atas ke dalam situasi ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu hukum, meski tidak sedramatis dalam ilmu fisika, tetapi pada dasarnya terjadi perubahan yang fenomenal mengenai hukum yang dirumuskannya dengan kalimat dari yang sederhana menjadi rumit dan dari yang terkotak-kotak menjadi satu kesatuan. Inilah yang disebutnya sebagai pandangan holistik dalam ilmu (hukum) (Rahardjo, 2006: 11). Pandangan holistik tersebut memberikan kesadaran visioner bahwa sesuatu dalam tatanan tertentu memiliki bagian yang saling berkaitan baik dengan bagian lainnya atau dengan keseluruhannya.

Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif adalah hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri,

melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*.

Aliran-aliran tersebut hanya melihat ke dalam hukum dan membicarakan serta melakukan analisis ke dalam, khususnya hukum sebagai suatu bangunan peraturan yang dinilai sebagai sistematis dan logis. Hukum progresif bersifat responsif yang mana dalam responsif ini hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri.

Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia, asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama, hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status law in the making dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.

Gagasan yang demikian ini jelas berbeda dari aliran hukum positif yang menggunakan sarana *analytical jurisprudence* yang bertolak dari premis peraturan dan logika. Bagi Ilmu Hukum Positif (dogmatik), kebenaran terletak dalam tubuh peraturan. Ini yang dikritik oleh hukum progresif, sebab melihat hukum yang hanya berupa pasal-pasal jelas tidak bisa menggambarkan kebenaran dari hukum yang sangat kompleks. Ilmu yang tidak bisa menjelaskan kebenaran yang kompleks dari realitas-empirik jelas sangat diragukan posisinya sebagai ilmu hukum yang sebenar ilmu (*genuine science*).

Hukum progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat. Dalam tipe yang demikian itu, hukum selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu

sendiri. Atau sebagaimana disebutkan oleh Mulyana dan Paul S.Baut bahwa hukum responsif mencoba mengatasi kepicikan (prokialisme) dalam moralitas masyarakat serta mendorong pendekatan yang berorientasi pada masalah yang secara sosial terintegrasi.

Hukum progresif yang bertumpu pada *rules and behavior*, menempatkan manusia untuk tidak terbelenggu oleh tali kekang *rules* secara absolute. Itulah sebabnya ketika terjadi perubahan dalam masyarakat, ketika teks-teks hukum mengalami keterlambatan atas nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, penegak hukum tidak boleh hanya membiarkan diri terbelenggu oleh tali kekang *rules* yang sudah tidak relevan tersebut, tetapi harus melihat keluar (*outward*), melihat konteks sosial yang sedang berubah tersebut dalam membuat keputusan-keputusan hukum.

Bertalian dengan hal itu, M. Nasir Djamil mengatakan, ”putusan ditekankan pada perintah pemberian program untuk terapi dan pelayanan dan fokus utama untuk mengidentifikasi pelaku dan perkembangan pendekatan positivis untuk mengoreksi masalah”. (Varia Peradilan No. 359, 2015:102).

Menurut peneliti, hal yang terkait dengan perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum dilaksanakan melalui pendekatan dan perlakuan secara manusiawi sesuai hak-hak anak, penyelesaian melalui hukum progresif, misalnya dengan tindakan diversi, penyediaan petugas pendamping khusus sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak, serta tindakan berani dari penegak hukum berdasarkan alasan yuridis dan sosiologis untuk kepentingan anak dan korban, itulah yang dinamakan tindakan progresif dalam hukum.

Hukum progresif bertumpu pada manusia, sehingga membawa konsekuensi pentingnya kreativitas para aktor dalam penanganan kasus anak. Kreativitas dalam konteks penegakan hukum selain untuk mengatasi ketertinggalan hukum, mengatasi ketimpangan hukum, juga dimaksudkan untuk membuat terobosan-terobosan hukum. Terobosan-terobosan hukum inilah yang dapat diharapkan dapat mewujudkan tujuan kemanusiaan melalui bekerjanya hukum, untuk membuat kebahagiaan manusia. Kreativitas penegak hukum dalam memaknai hukum tidak akan berhenti pada mengeja undang-undang, tetapi menggunakannya secara sadar untuk mencapai tujuan kemanusiaan. Menggunakan hukum secara sadar sebagai sarana pencapaian tujuan kemanusiaan berarti harus peka dan responsif terhadap tuntutan sosial (Rahardjo, 2005).

Menurut peneliti, hukum progresif sangat relevan untuk dipertimbangkan sebagai acuan oleh penyidik anak, penuntut umum anak dan hakim anak dalam menangani perkara anak dengan model tindakan diversi, karena jiwa dan *doctrin* hukum progresif sejalan dengan jiwa dan *doctrin* SPPA nomor 11 tahun 2012 yang menentukan bahwa sistem hukum dan sistem sosial harus sekerja sama untuk kepentingan anak, dengan penerapan:

1. Asumsi dalam penegakan sistem peradilan pidana (SPP) anak. Penegakan hukum peradilan pidana anak adalah menekankan untuk kepentingan anak, kesejahteraan dan kebahagiaan terbaik bagi anak, bukan semata-mata untuk kepentingan hukum peradilan anak. Peraturan perundang-undangan SPPA, bukan sebagai hukum yang mutlak dan final, tetapi selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*).

2. Tujuan penegakan SPPA dan Penegakan hukum sistem peradilan pidana anak dengan pendekatan progresif bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan anak.
3. Spirit dalam penegakan SPPA melalui tindakab diversi pelaku anakdilakukan dengan spirit atau semangat pembebasan terhadap tipe, cara berpikir, asas dan teori yang selama ini dipakai (mendominasi), dalam implementasi dan aplikasi UU Pengadilan Anak selama ini. Dengan demikian di penegakan SPPA melalui paradigma tindakan diversi anak terdapat semangat untuk dapat melakukan kreatifitas atau pembebasan terhadap kultur penegakan hukum (*administration of justice*) dalam menyelesaikan perkara anak dengan titik tolak pada tujuan kesejahteraan dan kebahagiaan anak.
4. Progresivitas dalam penegakan Sistem peradilan pidaan anak melalui tindakan diversi anak dalam bentuk memandang perundang-undangan SPP acnak selalu dalam proses untuk menjadi (*law in the making*), untuk menuju pada tujuan untuk kesejahteraan dan kebahaiaian manusia/anak. Progresivitas penegakan SPPA dengan tindakan diversi dilakukan karena di dalam proses penegakan hukum harus peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi di masyarakat baik local, nasional dan global tentang isu perlindungan anak. Progresivitas penegakan SPP anak ditunjukkan pula dengan menolak status-quo manakala menimbulkan kerugian bagi anak dan sangat merugikan kepentingan anak nakal.
5. Karakter penegakan Sistem peradilan pidana anak : Karakter penegakan SPP anak berusaha mengalihkan titik berat kajian yang semula menggunakan optik hukum menuju ke perilaku. Oleh karena itu dalam

penegakan SPP anak menitik beratkan pada tindakan-tindakan penegak hukum lebih menitik beratkan pada tujuan menuju pada kepentingan perlindungan anak. Karakter penegakan hukum progresif menyadari menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat. Oleh karena itu penegak hukum ketika mengimplemetasikan tindakan diversifikasi anak tidak dapat dilepaskan (merespon) untuk kepentingan atau kebutuhan-kebutuhan anak. Karakter penegakan hukum progresif memandang hukum tidak dipandang dari kacamata hukum itu sendiri melainkan dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai dan akibat yang timbul dari bekerjanya hukum.

Menurut peneliti, dengan pendekatan hukum progresif, dalam penegakan SPPA yang berkonflik dengan hukum para aktor akan selalu memperhatikan tujuan sistem peradilan anak untuk melindungi dan mengayomi kepentingan pelaku anak. Hukum progresif berbagi paham dengan legal realism karena hukum tidak dipandang dari kacamata hukum itu sendiri melainkan dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai dan akibat yang timbul dari bekerjanya hukum, sehingga dalam menerapkan proses peradilan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, penegak hukum sebagai aktor dalam penanganan kasus anak melihat tujuan yang ingin dicapai dalam SPPA tersebut, yaitu tujuan untuk kepentingan anak.

Menurut peneliti, tindakan diversifikasi sebagai tindakan sosial pada hakekatnya bahwa penegakan hukum terhadap anak adalah untuk memulihkan kembali keamanan dan ketertiban masyarakat (*restorative justice*) yang sempat terganggu akibat perilaku anak yang melanggar norma masyarakat, sehingga tercipta suatu

kepastian hukum, dan Tindakan hukum terhadap pelaku anak harus diimbangi pemikiran yang mendalam tentang makna tertentu dari keputusan untuk melakukan tindakan diversi pelaku anak, yaitu menjaga agar anak taat pada hukum, dan mencegah agar anak tidak melakukan perilaku yang bertentangan dengan aturan atau norma yang berlaku serta untuk menjaga harkat dan martabat anak sebagai manusia seutuhnya.

3. Teori Kontrol Sosial Travis Hirchi

Sebagai pelopor dari teori kontrol sosial menyatakan bahwa perilaku criminal merupakan kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikat atau terikat dengan individu. Argumentasi dari teori kontrol sosial adalah bahwa individu dilihat tidak sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum, namun menganut segi pandangan antithesis dimana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana. Jadi argumentasi ini menyatakan bahwa pada dasarnya kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar aturan hukum (Adang, 2013:102).

Adang (2013) menyatakan bahwa teori kontrol sosial berusaha untuk menjelaskan kenakalan dikalangan para remaja. Kenakalan diantara para remaja dikatakan sebagai "*deviasi primer*" maksudnya bahwa setiap individu yang melakukan:

- a) Deviasi secara periodic/jarang-jarang;
- b) Dilakukan tanpa organisir/tidak dilakukan dengan cara yang luhur;
- c) Sipelaku tidak menganggap dirinya sebagai sipelanggar;
- d) Pada dasarnya hal yang dilakukan itu, wajib dipandang sebagai deviasi oleh yang berwajib.

Dalam teori kontrol sosial manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki moral murni, oleh sebab itu manusia memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu. Jadi pada dasarnya, teori kontrol sosial berusaha untuk mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. berbeda dengan teori lain, tetapi dalam teori kontrol sosial lebih berorientasi pada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat pada hukum. Menurut Reiss yang dikutip dalam bukunya Adang (2013), terdapat tiga komponen kontrol sosial dalam menjelaskan kenakalan remaja, yaitu:

- a. Kurangnya kontrol internal yang memadai selama masa anak-anak.
- b. Hilangnya kontrol internal.
- c. Tidak adanya norma-norma sosial atau konflik antara norma-norma dimaksud dalam keluarga, lingkungan dekat, sekolah.

Dalam membedakan dua macam kontrol, yaitu *Personal Control* dan *Social Control*. *Personal Control* adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai tujuannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Sedang *Social Control* adalah kemampuan dari kelompok sosial atau lembaga-lembaga dalam masyarakat melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan untuk menjadi efektif (Adang, 2013).

Bertalian dengan hukum untuk rakyat, hukum itu bukan merupakan tujuan, tetapi sarana atau alat untuk mencapai tujuan yang sifatnya non yuridis dan berkembang karena rangsangan dari luar hukum, sehingga membuat hukum bersifat dinamis. (Tahapary, 2015)

Menurut peneliti, teori kontrol sosial memfokuskan diri pada teknik – teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat,

sehingga manusia taat pada hukum sebagai respon atas kekuatan-kekuatan pengontrol tertentu dalam kehidupan seseorang, misal seorang anak melakukan kriminal dan berkonflik dengan hukum ketika kekuatan-kekuatan yang mengontrol dalam masyarakat seperti norma masyarakat lemah atau hilang.

Kejahatan yang dilakukan oleh anak, karena lemahnya peran keluarga, karena keluarga merupakan tempat terjadinya pembentukan kepribadian, internalisasi, orang belajar baik dan buruk dari keluarga. Apabila internal dan eksternal kontrol lemah, alternative untuk mencapai tujuan terbatas, sehingga terjadilah delinkuen, hal ini merupakan sesuatu yang jarang terjadi. Manusia diberi kendali supaya tidak melakukan pelanggaran, karena itu proses sosialisasi yang adekuat (memadai) akan mengurangi terjadinya delinkuensi. Sebab, disinilah dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang yang diajari untuk melakukan pengekangan keinginan (*impulse*). Asumsi teori kontrol terdiri dari: (Mulyadi, 2008: 342)

- a. Harus ada kontrol internal maupun eksternal.
- b. Manusia diberikan kaidah-kaidah supaya tidak melakukan pelanggaran.
- c. Pentingnya proses sosialisasi bahwa ada sosialisasi yang *adequate* (memadai), akan mengurangi terjadinya delinkuen, karena disitulah dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang.
- d. Diharapkan remaja mentaati hukum.

Konsep kontrol eksternal menjadi lebih dominan setelah David Matza dan Gresham Sykes melakukan kritik terhadap teori subkultur dari Albert Cohen. Kritik tersebut mengaskan bahwa kenakalan remaja, sekalipun dilakukan oleh mereka yang berasal dari strata sosial yang rendah, terikat pada sistem-sistem nilai dominan didalam masyarakat.

D. Kerangka Pemikiran

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan hidup manusia dan kelangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh yang ada. Penyimpangan tingkah laku anak atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan anak oleh anak, antara lain disebabkan faktor derasnya arus globalisasi dalam bidang teknologi, informasi komunikasi, kebutuhan ekonomi dan keretakan rumah tangga orang tuanya menjadikan anak melakukan tindak pidana.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan suatu kegiatan bersama yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang, lembaga pemerintah dan swasta dengan tujuan mengusahakan pengawasan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya. Perlindungan yang diberikan negara terhadap anak-anak meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, hankam, maupun aspek hukum. Kesejahteraan anak merupakan orientasi utama dari perlindungan hukum. Secara umum, kesejahteraan anak tersebut adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Salah satu upaya pencegahan dan perlindungan anak-anak yang berkonflik dengan hukum, saat ini melalui penyelenggaraan SPPA. Konsep diversifikasi adalah proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku bersama-sama duduk dalam ruang mediasi untuk bersama-sama berbicara. Tindakan diversifikasi merupakan filsafat, proses, ide, teori dan intervensi, yang menekankan dalam memperbaiki kerugian yang disebabkan atau diungkapkan oleh perilaku kriminal. Proses ini sangat kontras dengan cara

standar menangani kejahatan yang dipandang sebagai pelanggaran yang dilakukan terhadap negara. Tindakan diversifikasi menemukan pijakan dalam filosofi dasar dari sila keempat Pancasila, yaitu musyawarah sebagai prioritas dalam mengambil keputusan. Tujuan penyelesaian dengan mediasi pelaku anak dan korban adalah untuk "memanusiakan" sistem peradilan, keadilan yang mampu menjawab apa kebutuhan yang sebenarnya dari korban, pelaku dan masyarakat.

Menurut ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA menegaskan bahwa proses penyelesaian perkara anak yang berumur 12 tahun hingga 18 tahun wajib mengutamakan tindakan Diversifikasi dalam penyelesaian kejahatan anak secara kekeluargaan dengan pihak penegak hukum sebagai mediator. Tindakan Diversifikasi berasumsi, bahwa tanggapan atau reaksi terhadap perilaku kejahatan tidak akan efektif tanpa adanya kerjasama dan keterlibatan anak sebagai korban/keluarganya, pelaku/keluarganya dan masyarakat.

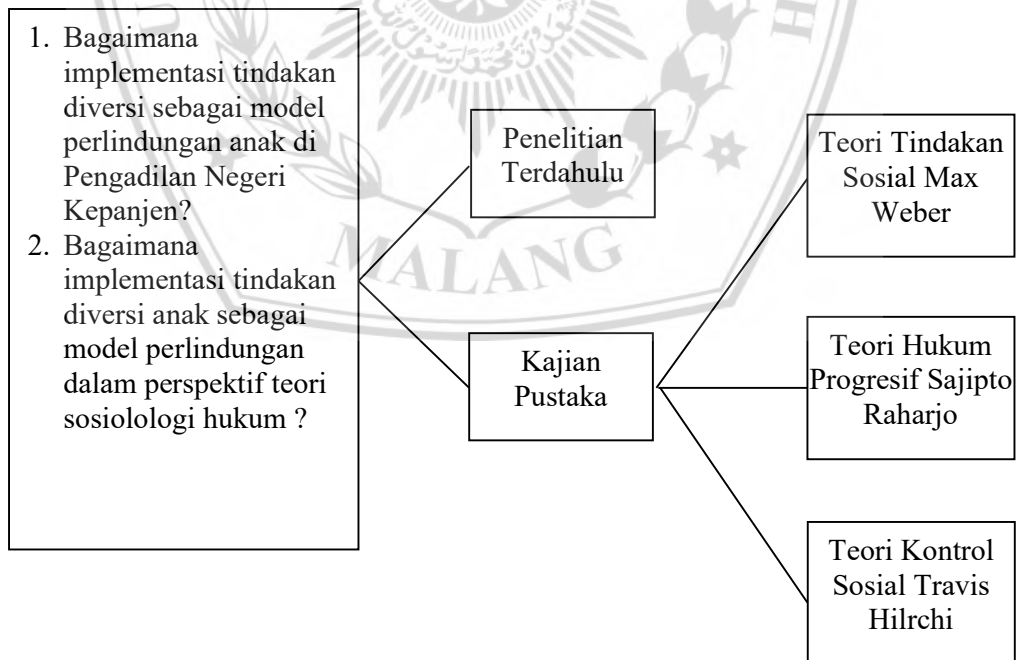
Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi konvensi PBB. Tentang hak-hak anak, melalui keputusan Presiden nomor 36 tanggal 25 Agustus 1960. dengan diratifikannya konvensi tersebut, seharusnya secara hukum negara berkewajiban melindungi dan memenuhi hak-hak anak, baik yang menyangkut hak politik, sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dan hukum.

Namun kenyataan negara belum mampu memenuhi kewajiban untuk melindungi dan mejaminakan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum salah satu permasalahan yang sampai saat ini masih kerap terjadi adalah penanganan anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan kejahatan. peradilan pidana berparadigma bahwa barang siapa yang melakukan kejahatan haruslah dihukum. Apabila paradigma ini diterapkan dalam perkara anak merupakan tindakan yang melanggar hak anak dan juga dapat membawa dampak buruk

kepada anak itu sendiri, baik secara psikis maupun fisik, bahkan dapat mengganggu tumbuh kembangnya anak sebagai generasi penerus cita-cita bangsa.

Jika melihat kepada hukum adat, menandakan bahwa proses diversi sudah ada dan usinya sudah tua, keberadaannya barangkali sama tuanya dengan hukum pidana itu sendiri, bahkan beribu tahun, upaya penanganan perkara pidana, pendekatan justru ditempatkan sebagai mekanisme utama bagi penanganan tindak pidana yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Munculnya tindakan diversi karena proses pidana sebelum berlakunya Undang-undang nomro 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana yang mengatur tindakan diversi perkara anak belum memberikan perlindungan pada anak, karena peradilan pidana sebelumnya menggunakan pendekatan retributif justice yang berorientasi pemberian sanksi pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana .

Alur kerangka pikir dalam penelitian ini adalah:



Bagan 2.1
Kerangka Pemikiran